

## **DARI TRADISI KE TRANSFORMASI: RESPON PONDOK PESANTREN MAMBA'UL HUDA TERHADAP UU PESANTREN MELALUI PROGRAM BLKK**

Misbakhul Munir  
[bakhul1990@gmail.com](mailto:bakhul1990@gmail.com)  
STIT Sunan Giri Trenggalek

### **Abstract**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pondok Pesantren Mamba'ul Huda merespons Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren melalui implementasi program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori identitas sosial Victor Turner, artikel ini menyoroti dinamika transformasi identitas pesantren dari institusi keagamaan tradisional menuju lembaga yang mampu menegosiasikan eksistensinya di tengah tuntutan modernitas dan kebijakan negara. BLKK diposisikan sebagai strategi pemberdayaan yang tidak hanya memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, tetapi juga memperluas peran sosialnya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP. Mamba'ul Huda tidak sekadar menjadi objek dari kebijakan pemerintah, melainkan menjadi subjek aktif yang mengartikulasikan nilai-nilai tradisional pesantren dalam format kelembagaan yang lebih adaptif dan berdaya saing. Dengan demikian, program BLKK menjadi wujud konkret dari upaya pesantren dalam menjawab tantangan kontemporer tanpa kehilangan akar historis dan identitasnya.

**Keywords:** Tradisi, Transformasi, Pesantren.

### **PENDAHULUAN**

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki akar kuat dalam tradisi lokal dan spiritualitas Islam (Mundhori, 2024). Sebagai lembaga yang lahir dari masyarakat dan berkembang di tengah komunitas Muslim, pesantren memainkan peran penting dalam pembentukan moral, identitas sosial, dan struktur kultural umat Islam Indonesia. Tradisi keilmuan, relasi sosial antara kiai dan santri, serta nilai-nilai asketis menjadi fondasi kuat pesantren salaf yang hingga kini masih eksis di berbagai daerah. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pesantren menghadapi dinamika besar yang dipicu oleh perubahan sosial, kemajuan teknologi, tuntutan ekonomi, serta kebijakan negara. Tuntutan kerja pasca lulus, menjadi satu hal pokok yang banyak menjadi pertimbangan (Sullam, 2020). Salah satu tonggak penting dari campur tangan negara dalam dunia pesantren adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU ini tidak hanya mengakui pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga mengatur secara rinci tentang fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Melalui UU tersebut, pemerintah ingin membingkai eksistensi pesantren dalam kerangka negara-bangsa modern. Terdapat pengakuan formal atas keberadaan pesantren, termasuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan, mekanisme akreditasi, penjaminan mutu, hingga peran pesantren dalam pembangunan sosial-ekonomi (Usman, 2021). Secara

ideal, UU ini menjanjikan penguatan posisi pesantren dan peningkatan kesejahteraan santri dan kiai. Namun di sisi lain, regulasi ini membuka ruang intervensi negara yang dapat mempengaruhi struktur simbolik dan otonomi budaya pesantren. Salah satu bentuk konkret intervensi tersebut adalah kehadiran program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), yang masuk ke lingkungan pesantren melalui bantuan pemerintah dalam bentuk infrastruktur, pelatihan keterampilan, dan sarana teknologi. BLKK dirancang untuk menjawab salah satu misi UU Pesantren, yakni pemberdayaan masyarakat. Pesantren-pesantren salaf seperti PP. Mamba’ul Huda di Trenggalek menjadi bagian dari sasaran program ini.

PP. Mamba’ul Huda merupakan pesantren salaf yang dikenal lebih menekankan pendidikan karakter dan adab dibanding pencapaian akademik formal. Di bawah asuhan Kiai Dhofir, pesantren ini membentuk komunitas santri yang hidup dalam kesederhanaan dan relasi sosial yang akrab. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pesantren ini mengalami penurunan jumlah santri mukim secara drastis. Di tengah situasi itu, hadirnya BLKK membawa simbol dan sistem baru ke dalam struktur lama pesantren. Masuknya simbol modern seperti komputer, pelatihan kerja, dan metode pelatihan teknis menimbulkan pergeseran makna dan kegelisahan identitas.

Beberapa studi terdahulu telah menyoroti transformasi pesantren dalam konteks pendidikan dan manajemen kelembagaan. Namun, belum banyak yang menelaah secara kritis bagaimana pesantren menyikapi perubahan ini dari sudut pandang budaya dan simbol. Padahal, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga institusi kultural yang sarat simbol, ritus, dan nilai yang dikonstruksi secara historis dan kolektif. Implementasi UU. Pesantren pernah diteliti oleh Panut dkk. Menunjukkan bahwa masalah yang muncul adalah pasca Undang-undang ini dilaksanakan, yakni pada penglolaan yang harus dilaksanakan oleh Lembaga pesantren, termasuk pendanaan dan kemampuan pesantren dalam melanjutkan program pemerintah (Panut dkk, 2021). Penelitian tentang optimalisasi Balai Latihan Kerja Komunitas juga pernah dilakukan oleh Harweli. Menunjukkan bahwa antara pengurus BLKK dan pemangku kebijakan pesantren harus sinergis dalam menjalankan program pemerintah. Selain itu, program pelatihan kerja sudah berjalan sebagaimana mestinya, malah sangat membantu dalam menumbuhkan *life skill* para santri (Harweli, 2024).

Dalam konteks ini, pendekatan Clifford Geertz menjadi relevan. Geertz melihat budaya sebagai sistem makna simbolik yang dikonstruksi dan dijalani masyarakat (Muwaffiqillah, 2023). Dalam kerangka ini, pesantren dapat dipahami sebagai arena tafsir, di mana simbol-simbol baru seperti BLKK tidak serta-merta diterima atau ditolak, tetapi dinegosiasikan dalam sistem makna yang sudah ada. Proses ini membuka kemungkinan munculnya bentuk identitas baru yang bersifat hibrid.

BLKK sebagai representasi negara modern bukan hanya hadir sebagai program pelatihan, tetapi sebagai narasi pembangunan yang membawa ideologi tertentu: efisiensi, produktivitas, dan kompetensi. Hal ini dapat berpotensi menggeser nilai-nilai lama pesantren seperti ketekunan, keberkahan, dan pengabdian. Di sinilah letak pentingnya kajian ini, untuk melihat bagaimana pesantren menyusun ulang narasi identitasnya dalam

interaksi dengan simbol-simbol baru. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan proses transformasi dan negosiasi identitas sosial pesantren sebagai respons terhadap kebijakan negara dalam bentuk program BLKK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap bagaimana komunitas pesantren mengelola makna dan simbol-simbol baru yang dihadirkan oleh kebijakan tersebut agar tetap selaras dengan nilai-nilai tradisional dan mempertahankan keotentikan pesantren.

Pendekatan Turner sangat relevan dalam memahami dinamika pesantren, terutama ketika institusi ini berada dalam fase perubahan akibat intervensi kebijakan negara, seperti implementasi Undang-Undang Pesantren melalui program BLKK. Victor Turner adalah tokoh penting dalam antropologi simbolik yang dikenal luas melalui teori drama *sosial* dan konsep *liminalitas*. Dalam pandangannya, kehidupan sosial tidaklah statis, melainkan penuh dengan proses perubahan yang dinamis dan konflik simbolik. Masyarakat, menurut Turner, sering menghadapi ketegangan antara struktur sosial yang mapan dan kekuatan-kekuatan yang mendorong perubahan. Ketika struktur ini terguncang, maka akan muncul *drama sosial*, serangkaian tahapan yang menggambarkan bagaimana kelompok sosial merespons krisis, melakukan negosiasi, dan akhirnya membentuk kembali identitas kolektifnya. Salah satu konsep kunci Turner adalah *liminalitas*, yakni fase ambang dalam ritus peralihan, di mana individu atau komunitas tidak lagi berada dalam keadaan lama, namun juga belum sepenuhnya memasuki kondisi baru. Pada tahap ini, terjadi pelepasan dari struktur sosial sebelumnya dan pencarian makna baru yang bersifat sementara, fleksibel, dan penuh kemungkinan. Dalam kerangka ini, simbol memiliki peran sentral sebagai penanda dari transisi, konflik, maupun rekonsiliasi nilai-nilai yang sedang dinegosiasikan oleh masyarakat.

Pesantren sebagai lembaga tradisional tidak hanya menghadapi perubahan material seperti pembangunan sarana pelatihan atau penambahan kurikulum keterampilan tetapi juga terlibat dalam pergolakan simbolik yang menyentuh inti identitasnya: antara nilai adab, khidmah, kesederhanaan, dengan simbol-simbol baru seperti produktivitas, efisiensi, dan orientasi pasar. Dalam konteks penelitian ini, teori Victor Turner digunakan untuk membaca PP. Mamba’ul Huda sebagai komunitas yang sedang mengalami *fase liminal*. Penerimaan terhadap program BLKK bukan sekadar respons administratif terhadap kebijakan negara, tetapi sebuah momen transformasi simbolik yang menempatkan pesantren dalam posisi transisional: tidak sepenuhnya tradisional, tetapi juga belum sepenuhnya modern. BLKK menjadi *arena simbolik* di mana proses negosiasi identitas berlangsung antara mempertahankan nilai-nilai lama dan merespons tuntutan baru yang datang dari luar.

Melalui kerangka *drama sosial* Turner, penelitian ini menelusuri bagaimana pesantren merespons konflik nilai yang muncul akibat masuknya program BLKK: apakah melalui penolakan, kompromi, reintegrasi, atau bahkan pembentukan identitas baru. Pelatihan komputer, keterampilan menjahit, atau bengkel motor dalam BLKK bukan hanya praktik teknis, melainkan simbol-simbol yang membawa narasi modernisasi ke dalam ruang pesantren. Namun demikian, makna simbol-simbol ini tidak serta-merta ditelan bulat, melainkan dinegosiasikan ulang sesuai dengan nilai lokal dan nalar budaya

pesantren.

Dengan menggunakan teori Turner, penelitian ini melihat pesantren bukan sebagai institusi pasif yang digerakkan oleh kebijakan negara, melainkan sebagai agen budaya yang secara aktif mengelola transisi simbolik. Liminalitas menjadi jendela untuk memahami kompleksitas respons komunitas pesantren terhadap perubahan: ketegangan, ambiguitas, kreativitas, dan bahkan kemungkinan pembaruan identitas yang berakar namun juga terbuka. Dengan demikian, pendekatan simbolik-prosesual Victor Turner menawarkan kerangka konseptual yang tajam untuk mengkaji dinamika identitas pesantren dalam masa transisi akibat intervensi kebijakan. Ia membantu kita memahami bahwa transformasi pesantren bukanlah sekadar perubahan struktural, tetapi juga pergulatan simbolik yang berlangsung di medan liminal antara tradisi dan transformasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami dinamika transformasi simbolik di Pondok Pesantren Mamba’ul Huda dalam merespons implementasi Undang-Undang Pesantren melalui program BLKK. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan pengelola pesantren, pelaksana BLKK, santri, alumni, dan peserta pelatihan, serta dokumentasi aktivitas pelatihan dan arsip pesantren. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif menggunakan teori *drama sosial* dan *proses liminalitas* Victor Turner untuk mengkaji bagaimana komunitas pesantren mengalami, merespons, dan menegosiasikan perubahan sosial yang ditimbulkan oleh hadirnya BLKK. Fokus utama analisis diarahkan pada proses-proses simbolik yang mencerminkan pergeseran identitas, terutama bagaimana pesantren menafsir ulang simbol-simbol modern dalam kerangka nilai-nilai tradisional dan kultural yang mereka anut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren Mamba’ul Huda merupakan salah satu pesantren salaf yang tidak memiliki sekolah formal dan dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan jumlah santri secara signifikan, terutama pasca wafatnya pengasuh karismatiknya, Kiai Dhofir. Meskipun demikian, kegiatan pengajian kitab dan madrasah diniyah tetap berjalan secara rutin, meski hanya diikuti oleh sedikit santri mukim dan warga sekitar. Kondisi ini menggambarkan fase transisi yang dialami oleh pesantren, di mana keberlanjutan identitas keilmuan dan sosialnya tengah diuji oleh realitas demografis dan perubahan orientasi pendidikan masyarakat.

Dalam situasi tersebut, BLKK hadir sebagai salah satu bentuk intervensi negara yang memberikan dukungan berupa pelatihan multimedia. Program ini menjadi alternatif bagi pesantren untuk memperkuat keterampilan hidup (life skill) para peserta, mengingat durasinya yang singkat (24 hari), fleksibel, dan berisi ilmu baru yang sebelumnya tidak tersedia di lingkungan pesantren salaf. Pelatihan ini juga menghadirkan peluang baru dalam dakwah digital, karena multimedia dipandang dapat membantu menyebarkan syiar pesantren kepada masyarakat luas melalui konten-konten visual dan digitalisasi kegiatan pesantren. Yang menarik dari implementasi BLKK di pesantren ini adalah sifat inklusif pesertanya. Tidak hanya terbatas pada santri mukim atau internal pesantren, pelatihan

juga diikuti oleh masyarakat umum di sekitar pesantren, bahkan alumni dari luar kabupaten seperti Tulungagung. Model partisipasi ini menunjukkan bahwa Mamba'ul Huda telah lama memiliki watak keterbukaan sosial, di mana relasi pesantren dengan masyarakat tidak bersifat eksklusif tetapi kolaboratif. Hal ini memperkuat karakter pesantren sebagai institusi budaya yang tumbuh bersama komunitasnya.

Secara sosial dan budaya, kehadiran BLKK tidak serta-merta merombak struktur identitas pesantren. Justru, pelatihan ini membantu mengkokohkan peran sosial pesantren sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Nilai-nilai seperti adab, kesederhanaan, dan khidmah tetap dipertahankan, sementara pelatihan multimedia menjadi bagian dari perluasan fungsi pesantren dalam konteks kontemporer. Dengan kata lain, BLKK bukan menggantikan nilai-nilai lama, tetapi memberikan ruang simbolik baru untuk dimaknai dalam kerangka tradisi yang ada.

Namun demikian, tantangan muncul dalam aspek keberlanjutan dan relevansi keterampilan pasca pelatihan. Para lulusan BLKK multimedia menghadapi kendala dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh karena tidak memiliki perangkat teknologi yang memadai di rumah. Hal ini berbeda dengan pelatihan seperti tata boga, menjahit, atau pengelasan yang tidak membutuhkan modal besar dan bisa langsung diaplikasikan. Artinya, jenis pelatihan yang diberikan perlu mempertimbangkan latar belakang ekonomi peserta agar hasilnya lebih optimal dan berdaya guna.

Selain itu, hubungan antara BLKK dan dunia kerja masih lemah. Lulusan pelatihan kerap tidak diterima industri karena belum memiliki pengalaman dan jam terbang. Dalam hal ini, diperlukan peran aktif pemerintah untuk memfasilitasi kemitraan antara pesantren dan sektor industri. BLKK seharusnya tidak berhenti pada pelatihan teknis, tetapi juga mengarah pada pembentukan jejaring ekonomi yang mendukung pemberdayaan berkelanjutan. Dengan demikian, pesantren dapat memainkan peran ganda: sebagai penjaga tradisi dan agen transformasi sosial.

Pesantren Mamba'ul Huda saat ini tengah berada dalam fase transisional yang khas, sebagaimana digambarkan dalam teori *liminalitas* Victor Turner. Setelah wafatnya Kiai Dhofir, sosok kharismatik yang menjadi penopang otoritas simbolik pesantren, institusi ini menghadapi tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan identitasnya sebagai pesantren salaf. Penurunan jumlah santri, terutama santri mukim, mencerminkan krisis struktur dalam istilah Turner: yaitu momen ketika keteraturan sosial yang stabil mulai kehilangan daya ikatnya, dan komunitas memasuki ruang ambang yang penuh ketidakpastian.

Namun, sebagaimana ditunjukkan Turner dalam *drama sosial*, fase liminal bukan hanya kondisi krisis pasif, melainkan ruang dinamis yang membuka peluang untuk transformasi simbolik. Dalam konteks ini, kehadiran BLKK (Balai Latihan Kerja Komunitas) di PP. Mamba'ul Huda dapat dibaca sebagai intervensi negara yang memicu *drama sosial* baru: yaitu pertemuan antara nilai-nilai tradisional pesantren dengan simbol-simbol modernitas seperti teknologi multimedia, efisiensi pelatihan, dan orientasi pasar.

Pelatihan multimedia melalui BLKK bukan sekadar transfer keterampilan teknis, melainkan merupakan *arena simbolik* tempat terjadinya negosiasi nilai dan identitas.

Dalam istilah Turner, pesantren dan para santrinya kini menempati posisi *communitas*—yaitu ikatan sosial non-hirarkis yang terbentuk dalam situasi liminal, ketika struktur lama belum pulih dan struktur baru belum terbentuk sepenuhnya. Di sinilah pesantren memainkan peran penting sebagai fasilitator proses transisi, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai utama seperti adab, kesahajaan, dan khidmah, sembari membuka ruang bagi simbol-simbol baru seperti kreativitas digital dan keterampilan kerja kontemporer.

Menariknya, sifat inklusif dari pelatihan BLKK memperlihatkan bahwa Mamba’ul Huda tidak sedang menarik diri dari masyarakat, tetapi justru mempertegas posisinya sebagai pusat komunitas yang *terbuka dan kolaboratif*. Keterlibatan alumni dari luar daerah, serta warga sekitar pesantren, memperlihatkan bahwa identitas pesantren salaf tidak dimaknai secara tertutup, melainkan lentur dan dialogis. Dalam kerangka Turner, ini adalah bentuk *reintegrasi simbolik* di mana pesantren menata ulang perannya dalam struktur sosial baru dengan membawa serta elemen-elemen lama yang dimaknai ulang.

Meski demikian, dinamika ini tidak lepas dari ketegangan simbolik. Satu sisi, pesantren tengah membuka ruang bagi makna-makna baru melalui pelatihan multimedia dan semangat pemberdayaan. Namun di sisi lain, realitas ekonomi peserta dan terbatasnya akses terhadap perangkat teknologi menimbulkan kesenjangan antara harapan simbolik dan realitas praksis. Hal ini menunjukkan bahwa fase liminal tidak selalu berakhir dengan reintegrasi yang mulus. Sebaliknya, ia dapat berlangsung lama, bahkan berisiko stagnan, jika tidak disertai dukungan struktural yang memadai.

Turner menyatakan bahwa *liminalitas yang berlarut* tanpa arah reintegrasi dapat menghasilkan ketidakpastian identitas atau fragmentasi sosial. Dalam kasus BLKK di Mamba’ul Huda, ketidaktersambungan antara pelatihan dan dunia kerja merupakan salah satu bentuk *liminalitas tak selesai* yang perlu dijembatani. Oleh karena itu, penting bagi negaram sebagai aktor yang memproduksi simbol modern melalui BLKK untuk tidak berhenti pada pelatihan teknis, tetapi melanjutkan upaya hingga terbentuk jejaring kerja dan ekonomi yang dapat menguatkan hasil pelatihan secara berkelanjutan.

Apa yang dilakukan oleh PP. Mamba’ul Huda menunjukkan bahwa pesantren bukan sekadar penerima pasif dari intervensi negara. Ia bertindak sebagai aktor dalam *drama sosial*, yang menavigasi ketegangan antara tradisi dan modernitas melalui proses simbolisasi ulang. Dalam pelatihan multimedia, santri dan peserta tidak hanya belajar keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan makna baru misalnya, digitalisasi sebagai media dakwah, atau produksi konten sebagai wujud *khidmah* dalam bentuk yang relevan dengan zaman.

Dengan demikian, pesantren memainkan dua peran sekaligus: penjaga tradisi dan agen transformasi sosial. Nilai-nilai lama tidak ditinggalkan, tetapi dimodifikasi dalam bingkai simbolik baru yang tetap berpijak pada akar pesantren salaf. Inilah esensi dari *transformasi liminal* dalam teori Turner: bukan perubahan radikal yang menghapus masa lalu, tetapi pembentukan makna baru melalui krisis, konflik simbolik, dan rekonsiliasi nilai.

## KESIMPULAN

Implementasi program BLKK di Pesantren Mamba’ul Huda adalah contoh konkret bagaimana institusi tradisional merespons intervensi kebijakan negara dalam kerangka negosiasi identitas. Dengan menggunakan teori Victor Turner, kita dapat memahami bahwa proses ini bukan sekadar adaptasi teknis, melainkan pergulatan simbolik yang kompleks dan berlapis. Pesantren tidak hanya bertahan di tengah krisis demografi dan perubahan orientasi masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi inovasi yang tetap berpijak pada nilai-nilai lokal. Dalam drama sosial ini, pesantren menjadi panggung utama di mana simbol-simbol lama dan baru dipertemukan, dipertentangkan, dan akhirnya dinegosiasikan demi membentuk identitas yang relevan, otentik, dan berdaya guna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Harweli, Dafri, and Supratman Supratman, ‘Optimalisasi Peran Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Pondok Pesantren Dalam Meningkatkan Keterampilan Dan Kemandirian Santri’, *Menara Ilmu*, 18.2 (2024), doi:10.31869/mi.v18i2.5601
- Muhammad Usman, Anton Widyanto, ‘Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia’, *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 8.1 (2021), pp. 57–70
- Mundhori, Nur Syam, and Anis Humaidi, ‘THE ROLE OF PESANTREN IN THE EMPLOYMENT OF WORKERS IN THE INDUSTRIAL ERA 4.0’, *Jurnal Studi Pesantren*, 4.1 (2024), pp. 1–16, doi:10.35897/studipesantren.v4i1.1091
- Muwaffiqillah, Moch., ‘Analisis Teoritik Atas Tulisan Geertz Tentang Kyai Jawa Sebagai Cultural Broker’, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4.1 (2023), pp. 17–36, doi:10.33367/ijhass.v4i1.3878
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, ‘Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), doi:10.29040/jiei.v7i2.2671
- Sullam, Muhammad Ridho, ‘MADRASAH, PONDOK PESANTREN DAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0’, *Muâşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2.2 (2020), p. 89, doi:10.18592/msr.v2i2.4317